

Eks Pengungsi Minta BPK Turun Tangan

PONTIANAK--Sekelompok orang yang mengatasnamakan eks-pengungsi kerusuhan sosial, mendatangi Kantor BPK RI wilayah Kalbar di Pontianak, Rabu (18/7) siang. Didampingi DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), mereka mendesak BPK segera mengaudit investigasi terhadap dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan, Tragedi Sosial Sambas 1999.

Ketua DPP LAKI Burhanuddin Abdudlah mengatakan, tragedi yang menyebabkan pengungsian itu sudah belasan tahun lalu, namun persoalan pengungsi ini belum juga terselesaikan terutama soal alokasi anggaran yang dianggap menyimpang. Dia meminta agar BPK dapat mengaudit dan menginvestigasi orang-orang yang bertanggung jawab diantaranya tim penanganan bencana waktu itu serta pengurus Yayasan Korban Kerusuhan Sosial Sambas (YKKSS). "Kasus ini belum ada kejelasan status hukumnya. Bayangkan saja, ini sudah sejak tahun 2001-2002.

Tapi sampai hari ini belum ada juga titik penyelesaiannya," tandas dia. Karena itu, sambung Burhan, pihaknya akan membantu para pengungsi dan mengawal kasus ini lantaran melihat ada kejanggalan yang terhadap ganti rugi yang diberikan para pengungsi. Kejanggalan itu, kata Burhan, dari pemerintah yang mengaku telah menyalurkan bantuan tersebut, sementara para pengungsi mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah provinsi. "Dari data yang kita kumpulkan, ada 12 ribu KK pengungsi eks Sambas ini, tapi tidak dari semua dari mereka menerima bantuan ini," ujar Burhan. Menurut Burhan, kejanggalan lainnya tampak pada jatah hidup (jadup) bagi pengungsi. Jadup yang dialokasikan untuk pengungsi selama sembilan bulan ternyata mereka hanya menerima selama tiga bulan jadup itu meliputi uang lauk-pauk senilai seribu lima ratus rupiah dan empat ons beras per orang per hari.

"Ada juga mengenai dana pemberdayaan yang dialokasikan lima juta rupiah per keluarga yang ternyata hanya disalurkan kepada sebagian pengungsi atau enam ribu keluarga.

Sehingga melihat beberapa kejanggalan tersebut, LAKI mendesak agar BPK RI wilayah Kalbar dapat melakukan audit mengenai kasus tragedi Sambas ini," ucapnya.

Kepala Sub Bagian Umum PLH BPK RI

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Eks Pengungsi Minta BPK Turun Tangan

Sambungan dari halaman 16

wilayah Kalbar, Supadi akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan LAKI,

namun hal itu disesuaikan dengan data yang ada. "Akan kita sampaikan ke atas sana," ucapnya. Kendati demikian, Supadi tak menampik jika

pihaknya masih memerlukan data-data mengenai persoalan bantuan bagi pengungsi ini dibiarkan berlarut-larut sejak tahun 1999 itu. (ars)